

## Pengaruh Dau, Dak Dan Pad Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2019

Violetta Berliani Abror<sup>1</sup>

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia<sup>1</sup>

Email: Violettaberliania@gmail.com<sup>1</sup>

### INFO ARTIKEL

Volume 5  
Nomor 4  
Bulan Juni  
Tahun 2023  
Halaman 273-280

### ABSTRAK

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik untuk mencatat dan menganalisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 9 SKPD di Kabupaten Lumajang selama periode 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci : dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan

### ABSTRACT

*Public sector accounting is a technical mechanism for recording and analyzing financial transactions related to efforts to produce useful public goods and services to meet public needs. The purpose of this study was to determine the effect of general allocation funds, special allocation funds and local revenue on the financial performance of the Lumajang Regency Government. The sampling technique in this research is purposive sampling. The sample used was 6 SKPD in Lumajang Regency during the 2016-2019 period. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results show that the general allocation fund has a positive significant effect on the Financial Performance of the Lumajang Regency Government. The Special Allocation Fund has a significant positive effect on the Financial Performance of the Lumajang Regency Government. Regional Original Income (PAD) has a significant positive effect on the Financial Performance of the Lumajang Regency Government.*

*Keywords: general allocation fund, special allocation fund, local revenue and financial performanc*

## PENDAHULUAN

Sebagai Negara kesatuan, Indonesia memiliki daerah-daerah yang mana menjadi bagian dari kesatuan Indonesia dimana setiap daerah tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut dengan daerah otonom diberikan hak dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah di berlakukan di Indonesia melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada tahun 2004, undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan undang – undang nomor 32 tahun 2004 hingga saat ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Dalam sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan mengelola sumber – sumber keuangan. Keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sendiri dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada public. Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil – hasil yang di capainya (Indrawan, 2013). Sebagai implikasinya peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan public dan pencapaian tujuan – tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tersentu. Pengukuran kinerja merupakan proses penetapan standar hasil akuisisi, program dan permodalan yang dilakukan perusahaan/organisasi.

Menurut (Whittaker & Simons, 2000) pengukuran kinerja ialah metode penilaian kemajuan yang sudah didapatkan dipadankan dengan tujuan yang sudah diputuskan. Menurut (Mahmudi, 2010) pengertian pengukuran kinerja ialah proses evaluasi kemajuan pekerjaan pada pencapaian tujuan dan target yang sudah diputuskan, meliputi informasi mengenai ketepatan pemakaian sumber daya dan penghasilan mutu barang/jasa, serta kesetaraan antara kinerja dengan sasaran juga keefektifan tindakan dalam menggapai tujuan.

Perkembangan dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan PAD. Ketergantungan fiscal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil jika kontribusi PAD semakin besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditandai dengan tingkat kemandirian dari daerah tersebut dimana asas kemandirian merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan yang baik. PAD merupakan sumber keuangan yang memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan sumber keuangan yang berasal dari luar PAD.

Salah satu komponen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan APBD baik ditingkat provinsi, kota dan kabupaten adalah Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari dana perimbangan. DAU sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBD turut memberikan kontribusi terhadap pengelolaan anggaran di daerah,

oleh karena itu pemanfaatan sesuai dengan fungsinya. DAU melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam *explanatory research* yang berarti sebuah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menguji hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Pada Penelitian ini, penulis hanya menggunakan sumber data internal karena semua data diperoleh dari BPKD Kabupaten Lumajang yang menjadi objek penelitian penulis. Dimana sumber data dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang tahun 2016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data bersumber dari data asli yang sudah ada dan peneliti hanya mengelola data yang sudah ada untuk mendapatkan hasil dari variable yang terkait dengan keuangan

Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dimana obyek yang diamati berupa benda mati dan sifat-sifat yang ada dalam obyek tersebut dapat diukur atau diamati. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan variabel bebas adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kinerja Keuangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Analisis Data

Tabel 1. Deskriptif statistik

Variabel				Std.
	Min	Max	Mean	Deviation
DAU	706561809	27894979608	9388473700	7526782044
DAK	787663700	28909846550	9152762652	7551645102
PAD	100999000	27872372500	10890796093	8755637830
KK	0.7722	0.9954	0.9194	0.0508

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat diartikan bahwa: variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 706,561,809.26 yang dimiliki oleh Dinas Perikanan tahun 2019, nilai maksimum pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 27,894,979,608 yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2019. Nilai Dana Alokasi Umum (DAU) pada kurun waktu 2016–2019 menunjukkan nilai rata - rata sebesar 9,388,473,700.91 dengan standar deviasi sebesar 7,526,782,044.43 yang berarti bahwa data pada nilai Kinerja Keuangan memiliki sebaran data yang kecil karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata – rata.

Berdasarkan hasil pada tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 787663700.00 dimiliki oleh Dinas Perikanan pada tahun 2019. Sedangkan nilai maksimumnya adalah sebesar 28909846550.00 yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2019. Nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016-2019 memiliki rata-rata 9,152,762,652.08 dengan standar deviasi sebesar 8,755,637,830.43 yang berarti variabel ini memiliki sebaran data

yang kecil karna standar deviasinya lebih kecil dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi dari sebaran data.

Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,009,990,000.00 yang dimiliki oleh Dinas Pertanian tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 27,872,372,500.00 yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. pada tahun 2016. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 10,890,796,093.47 dengan nilai standar deviasi sebesar 8,755,637,830.43 yang berarti bahwa data pada Dana ALokasi Umum memiliki sebaran yang kecil karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebuah rasio yang dapat diukur dengan efisiensi penyerapan pendapatan daerah. nilai minimum pada Kinerja Keuangan sebesar 0,7722 yang dimiliki oleh Dinas Pertanian pada tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum pada Kinerja Keuangan sebesar 0,99954 yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2018. Kinerja Keuangan pada penelitian dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,9194 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0508 yang berarti bahwa data pada Kepemilikan saham memiliki sebaran yang kecil karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa rata rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Lumajang adalah 92% dengan fluktuasi sebaran data Kepemilikan saham asing dari nilai rata-ratanya sebesar 0.05%

### Analisis Regresi Berganda

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Variabel bebas	Koefisien Regresi
Konstanta	1.103
Dana Alokasi Umum	0.060
Dana Alokasi Khusus	0.041
Pendapatan Asli Daerah	0.026

Sumber : Data diolah, 2021.

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Dana Alaokasi Umum (x1), Dana ALokasi Khusus (x2) Pendapatan Asli Daerah (x3), terhadap Kinerja Keuangan (Y). Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut, dapat disusun dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut: Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 1.103; artinya jika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah nilainya adalah 0, maka rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebesar bernlai sebesar 1.103.
- Koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0.060; artinya jika variabel independent lain nilainya tetap dan nilai Dana Alokasi Umum bertanda positif, bila Dana Alokasi Umum meningkat satu satuan maka Kinerja keungan akan mengalami kenaikan sebesar 0.060 atau sebesar 5.8%.
- Koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0.041; artinya jika variabel independent lain nilainya tetap dan nilai Dana Alokasi Khusus bertanda positif, bila Dana Alokasi Khusus meningkat satu satuan maka Kinerja Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0.041 atau sebesar 8.3% ;
- Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.026; artinya jika variabel independent lain nilainya tetap dan nilai Pendapatan Asli Daerah bertanda positif, bila Pendapatan Asli Daerah meningkat satu satuan maka Kinerja keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0.026 atau sebesar 5%;

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.835 <sup>a</sup>	0.698	0.670	0.0324929

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil perhitungan regresi pada tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,698. hal ini berarti sebesar 69,8% Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang dipengaruhi oleh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan sebesar 30,2 % Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

### Pembahasan

#### **Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang 2016-2019**

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  dengan  $t_{hitung}$  sebesar 1.629 maka hipotesis penelitian diterima dan variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Lumajang Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mampu membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang”.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang digunakan untuk pemerataan pembangunan pada daerah yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan daerah dan juga kreativitas pemerintahan daerah. Dengan begitu pemerintah daerah yang lebih tahu akan potensi daerahnya akan lebih mengerti dalam pengalokasian DAU sehingga pemerataan pembangunan dapat terjalin dengan lebih baik. Potensi daerah yang dapat dikembangkan dapat dengan mudah tersentuh dalam hal pembangunannya sehingga hal ini membantu daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah

Berdasarkan data penelitian, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Ini dikarenakan pemerintah daerah mengerti apa-apa saja potensi daerah sehingga dapat melakukan pembangunannya secara efektif dan efisien. Pengalokasian DAU yang sesuai kreativitas pemerintah daerah tentu saja sangat bergantung pada metode yang dilakukan pemerintah. Daerah. Jika kreativitas pemerintah daerah tepat sasaran dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum maka tentu saja Kinerja Keuangan pemerintah daerah tersebut akan turut meningkat, begitu juga sebaliknya Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priyono (2020) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Priyono (2020) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang merata akan membuat performa setiap wilayah pada daerah tersebut dapat bekerja dan memiliki performa yang baik juga secara merata sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah juga ikut meningkat.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pemerintah daerah kabupaten lumajang 2016-2019**

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.014 > 0.05$  dengan  $t_{hitung}$  sebesar 1.931 maka hipotesis penelitian diterima dan dinyatakan variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini

menunjukkan bahwa penelitian ini belum mampu membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang”.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran Dana alokasi khusus akan bergantung pada prioritas pemerintah pusat, maka dari itu besaran Dana Alokasi Khusus pada setiap dinas pemerintahan di Kabupaten lumajang juga sangat berbeda karna mengikuti kebijakan dan juga tujuan urgensi secara nasional.

Berdasarkan data penelitian yang ada, semakin besar Dana Alokasi Khusus akan membuat Kinerja Keuangan juga ikut meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya arahan jelas dari pemerintah pusat dalam pengalokasian pada pos keuangan yang strategis sehingga performa keuangan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang ketat karna mengikuti prioritas nasional juga menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Secara kolektif, sampel yang memiliki Dana Alokasi Khusus yang lebih besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Berdasarkan data penelitian Dinas Kesehatan selama 3 periode penelitian memiliki rata-rata DAK sebesar Rp 15 miliar sedangkan Dinas Perikanan Hanya memiliki DAK sebesar Rp 1 miliar. Begitu juga dengan kinerja keuangannya, Dinas kesehatan memiliki rata-rata kinerja keuangan 7% lebih besar daripada Dinas Perikanan, hal ini membuktikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang dapat dialokasikan dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik (Nanda, 2017), (Ikhwan, 2019), (Yunus, 2020), (Triska, 2020) dan (Machmud, 2018) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang 2016-2019**

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) asing memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.014 < 0.05$  dengan  $t_{hitung}$  sebesar 3.764 maka hipotesis penelitian diterima karena variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mampu membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dengan begitu besaran penerimaan PAD akan sangat bergantung pada faktor-faktor utama seperti potensi daerah, kekayaan alam, kualitas SDM, dsb. Semakin tinggi potensi daerah tersebut diikuti oleh kegiatan pemanfaatan potensi yang baik maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin meningkat.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah juga akan membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Semakin besar dana yang bisa digunakan oleh pemerintah semakin banyak pula keberhasilan yang dapat dicapai oleh pemerintahan dalam menyelenggarakan daerahnya. Berdasarkan data penelitian, Dinas Kesehatan yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih besar dari Dinas Perikanan membuktikan bahwa PAD yang lebih besar dapat menentukan performa kinerja keuangan dibuktikan dengan kinerja keuangan Dinas Kesehatan selama 3 tahun periode penelitian memiliki rata-rata kinerja keuangan sebesar 96%, lebih tinggi 7% dari dinas perikanan, dan lebih tinggi 13% dari Dinas Pertanian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nanda, 2017), (Ikhwani, 2019), (Yunus, 2020), (Triska, 2020) dan (Machmud, 2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja keuangan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan pada penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang 2016-2019

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. W. (2020). Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variable Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andlas*, 3(1).
- Ali, M., & Maisyuri. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiscal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(1).
- Ardhani, P. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah)*. Univrsitas Diponegoro Semarang.
- Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan ( Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh ). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Bahar, U. (2009). *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*. Jakarta: PT. Indeks.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Keti). Jakarta: Salemba Empat.
- Batubara, D. N. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdinto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. (Edisi Pert). Jakarta: Salemba Empat.
- Fatmawati, T. O., & Sapari. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4).
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(2), 85–91.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Haruman, T. (2010). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ikhwani, N. (2019). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(2).
- Indrawan, B. (2013). *Akuntansi Sektor Pubi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Julitawati. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Machmud, J. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 1–17.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Terb). Yogyakarta: Andi Offset.
- Muningsih, E., Supriyanta, Irfiani, E., & Puspitasari, D. (2020). *Sistem Informasi Manajemen*.

- Jakarta: Graha Ilmu.
- Nanda. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1).
- Priyono, N., Fatimah, A. N., & Nurcahya, Y. A. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 212–225.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ririn, G. (2011). *Tugas Dana Alokasi Umum dan Laporan Realisasi Anggaran*.
- Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Sanusi. (2011). *Metode penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2011). *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan* (edisi pert). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sidik. (2002). *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.
- Sirait, R. A. (2009). *Desentralisasi fiskal Dana Alokasi Umum*.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta:UPP STIM TKPN.
- Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wenny, C. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2(1), 39–51.
- Windhu, P. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010). *Jurnal FE Universitas Diponegoro*.
- Yunus, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FEB UN PGRI*, 5(1).